Nusantara Entrepreneurship and Management Review

NEMR 2026; 4(2): 180-189
eISSN 3030-928X

Artikel

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Mendorong UMKM, Penguatan Ekonomi Lokal, dan Efisiensi Anggaran Pemerintah di Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo

Renata Tri Lestari[1*], Chairil Anwar[1]

[1]Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan bahan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo dengan fokus pada model implementasi program, peran SPPG dalam mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan ekonomi lokal, dan implementasi program dalam menciptakan efisiensi anggaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG telah berjalan secara terstruktur melalui tahapan perencanaan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. SPPG berperan dalam meningkatkan keterlibatan UMKM melalui pemanfaatan produk pangan lokal sehingga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pengelolaan program yang terintegrasi dan optimalisasi belanja pemerintah pada kegiatan produktif berkontribusi terhadap efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Teori Keynesian, implementasi Program MBG melalui SPPG mampu menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi belanja pemerintah.

Kata kunci

Efisiensi Anggaran; Ekonomi Lokal; UMKM; Program Makan Bergizi Gratis; Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Korespondensi
Renata Tri Lestari
renata.lestari.tri@gmail.com

Copyright © 2026 LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a government policy aimed at improving the nutritional quality of the population while fostering local economic empowerment through the involvement of business entities in the provision of food supplies. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program via the Nutrition Provision Service Unit (SPPG) in Wunut Village, Sidoarjo Regency. It focuses on the program's implementation model, the role of the SPPG in facilitating the participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and strengthening the local economy, and the program's contribution to government budget efficiency. Studying employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, documentation, and literature review, and subsequently analyzed using the interactive analysis model developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the MBG Program has been implemented in a structured manner, encompassing stages such as planning, food procurement, meal preparation, and distribution to beneficiaries. The SPPG plays a key role in enhancing MSME participation by utilizing local food products, thereby strengthening local economic activity. Furthermore, integrated program management and the optimization of government spending toward productive activities contribute to budget efficiency while simultaneously improving public welfare. Grounded in Keynesian theory, the implementation of the MBG Program through the SPPG generates a multiplier effect that stimulates local economic growth by optimizing government expenditure.

Keywords

Budget Efficiency; Local Economy; MSMEs; Free Nutritious Meal Program; Nutrition Provision Service Unit

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat kelembagaan lokal, mengembangkan potensi wilayah, serta menciptakan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal menjadi pendekatan yang efektif dalam memperkuat ekonomi desa karena mendorong partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (Ristanti et al., 2025). Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa penguatan ekonomi desa akan lebih berkelanjutan apabila didukung oleh peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha lokal, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekonomi desa.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus mendorong berbagai kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan jangka panjang. Salah satu kebijakan strategis yang mulai diimplementasikan secara nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus membangun ekosistem ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia bahan pangan. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya memiliki dimensi sosial berupa pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menghasilkan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi daerah melalui mekanisme belanja pemerintah yang terdesentralisasi.

Implementasi Program MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan pangan, pengadaan bahan baku, proses

produksi makanan, distribusi kepada penerima manfaat, hingga pelaporan pelaksanaan program. Model implementasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma kebijakan publik yang tidak lagi memandang program bantuan sosial sebagai kegiatan konsumtif semata, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. SPPG memiliki fungsi strategis sebagai simpul ekonomi lokal karena menghubungkan belanja pemerintah dengan rantai pasok pangan yang melibatkan berbagai pelaku usaha lokal sehingga mampu menciptakan efek pengganda terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Saepuloh & Hilmi, 2026).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, serta keberadaan UMKM yang berkembang cukup pesat. Salah satu desa yang sudah melaksanakan Program MBG melalui SPPG adalah Desa Wunut. Desa ini memiliki karakteristik ekonomi yang didukung oleh aktivitas UMKM pangan, petani, peternak, dan berbagai usaha rumah tangga yang berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok Program MBG. Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut diharapkan mampu memperkuat sirkulasi ekonomi desa melalui peningkatan permintaan terhadap produk lokal sehingga belanja pemerintah yang dialokasikan untuk Program MBG tidak hanya menghasilkan manfaat sosial berupa peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Dari perspektif ekonomi makro, implementasi Program MBG dapat dijelaskan melalui Teori Keynesian yang menempatkan pengeluaran pemerintah (government expenditure) sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan permintaan agregat (aggregate demand). Menurut pendekatan Keynesian, peningkatan belanja pemerintah akan mendorong aktivitas produksi, meningkatkan permintaan tenaga kerja, memperluas kesempatan usaha, serta menghasilkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, apabila anggaran Program MBG sebagian besar dibelanjakan kepada petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal melalui mekanisme SPPG, maka dana publik akan berputar di dalam wilayah tersebut sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Temuan mengenai pentingnya belanja pemerintah sebagai instrumen pembangunan ekonomi juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada sektor produktif memiliki kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Program MBG juga menuntut adanya tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Efisiensi anggaran dalam sektor publik diartikan sebagai kemampuan pemerintah menghasilkan keluaran (output) dan manfaat (outcome) yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Program MBG, efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kemampuan SPPG dalam mengoptimalkan rantai pasok lokal, meminimalkan biaya distribusi, mengurangi ketergantungan terhadap pemasok dari luar daerah, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya efisiensi alokasi sumber daya, analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis), dan penganggaran berbasis kinerja dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek tata kelola, keberhasilan implementasi Program MBG juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendukung, terutama dalam pengelolaan pasokan bahan pangan dan koordinasi antaraktor yang terlibat. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan proses perencanaan kebutuhan bahan baku, pengendalian stok, distribusi, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian mengenai sistem informasi pasokan MBG menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan rantai pasok mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses distribusi, dan mengurangi kesalahan pencatatan dibandingkan sistem manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan SPPG tidak hanya bergantung pada aspek sumber daya manusia, tetapi juga pada dukungan teknologi informasi yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas Program MBG dari perspektif pemberdayaan ekonomi lokal, tata kelola publik, efisiensi sistem informasi, maupun kesiapan UMKM dalam memasuki rantai pasok program pemerintah. Penelitian mengenai pendampingan UMKM menuju integrasi Program MBG menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas usaha, perbaikan standar higienitas, identitas produk, serta penguatan manajemen usaha merupakan faktor penting agar UMKM mampu memenuhi standar pengadaan pemerintah. Sementara itu, penelitian lain lebih banyak menyoroti hubungan efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun dampak belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada tingkat desa dengan fokus pada keterkaitan antara model implementasi kebijakan, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta efisiensi anggaran pemerintah masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, menganalisis model implementasi Program MBG yang dijalankan oleh SPPG di Desa Wunut. Kedua, menganalisis peran SPPG dalam mendorong keterlibatan UMKM serta memperkuat ekonomi lokal melalui mekanisme pengadaan bahan pangan berbasis potensi daerah. Ketiga, menganalisis sejauh mana implementasi Program MBG melalui SPPG mampu menciptakan efisiensi anggaran pemerintah melalui optimalisasi belanja publik yang produktif, efektif, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis pelaksanaan program, keterlibatan UMKM dalam penyediaan kebutuhan pangan, kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal, serta upaya mewujudkan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (*purposive sampling*), yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa SPPG Desa Wunut merupakan salah satu unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjalankan kegiatan operasional secara aktif. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni implementasi program, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta pengelolaan penyediaan pangan dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wunut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, artikel ilmiah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Adapun studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah, buku, jurnal, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta efisiensi anggaran pemerintah.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis sehingga diperoleh temuan penelitian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, serta berbagai sumber pustaka yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang baik dan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. SPPG memiliki fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan pemenuhan gizi melalui penyediaan makanan bergizi kepada kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan program. Selain melaksanakan proses produksi makanan, SPPG juga bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan bahan pangan, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Keberadaan SPPG di Desa Wunut menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah sekitar.



Gambar 1. Dokumentasi Penelitian bersama Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Wunut, Kabupeten Sidoarjo

Secara operasional, kegiatan di SPPG dilaksanakan setiap hari kerja sesuai dengan jadwal distribusi yang telah ditetapkan. Seluruh proses dimulai dari penerimaan bahan pangan, pemeriksaan kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Setiap tahapan dilakukan dengan

memperhatikan aspek kebersihan, keamanan pangan, dan standar operasional yang berlaku agar makanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan kelayakan konsumsi.

A. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wunut diawali dengan penyusunan kebutuhan menu berdasarkan standar gizi yang telah ditetapkan. Setelah kebutuhan menu ditentukan, dilakukan penyediaan bahan pangan yang selanjutnya diproses menjadi makanan siap konsumsi. Proses pengolahan dilakukan secara terjadwal dengan memperhatikan komposisi gizi, kebersihan lingkungan kerja, serta kualitas bahan baku yang digunakan. Setelah proses produksi selesai, makanan dikemas sesuai jumlah penerima manfaat sebelum didistribusikan ke lokasi tujuan.

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wunut menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah berjalan secara terstruktur mulai dari pengadaan bahan pangan hingga proses distribusi. Setiap aktivitas operasional dilakukan secara berurutan sesuai pembagian tugas masing-masing sehingga proses pelayanan dapat berlangsung secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memiliki mekanisme kerja yang jelas dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi.

B. Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wunut turut melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia berbagai kebutuhan bahan pangan yang digunakan dalam proses produksi makanan. Keterlibatan tersebut terlihat dari pemanfaatan berbagai komoditas pangan yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga kebutuhan operasional program tidak sepenuhnya bergantung pada pemasok dari luar daerah. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Selain memberikan peluang usaha, keterlibatan pelaku usaha lokal juga mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di tingkat desa. Adanya permintaan bahan pangan secara berkelanjutan memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha sehingga mampu mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghasilkan manfaat dalam aspek pelayanan gizi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal.

C. Pengelolaan Program

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wunut didukung oleh pengelolaan kegiatan yang terstruktur mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan jadwal operasional yang telah ditetapkan sehingga proses pelayanan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi memenuhi standar kualitas serta dapat didistribusikan tepat waktu kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil observasi, koordinasi antarbagian dalam pelaksanaan kegiatan berjalan secara sistematis sehingga setiap proses operasional dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Wunut telah memiliki mekanisme operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Temuan-temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan terkait model implementasi program, keterlibatan UMKM dalam penguatan ekonomi lokal, serta efisiensi anggaran pemerintah.

Pembahasan

A. Model Implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang Dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Wunut, Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wunut dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan bahan pangan, pengadaan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara

sistematis sehingga setiap proses memiliki keterkaitan yang mendukung keberlangsungan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di Desa Wunut telah memiliki mekanisme operasional yang terstruktur dan mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi secara berkelanjutan.

Model implementasi tersebut sejalan dengan konsep SPPG yang menempatkan satuan pelayanan sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari pengelolaan bahan pangan hingga distribusi makanan kepada kelompok sasaran (Saepuloh & Hilmi, 2026). Selain berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan gizi, SPPG juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan pelaku usaha lokal melalui mekanisme pengadaan bahan pangan yang terintegrasi (Saepuloh & Hilmi, 2026).

Keberhasilan implementasi tersebut juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan operasional yang baik. Penggunaan sistem administrasi dan pengelolaan pasokan yang terstruktur mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta meminimalkan kesalahan dalam proses distribusi. Penelitian Cahyo dan Bisri (2026) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem informasi pasokan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan memperbaiki ketepatan distribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis (Cahyo & Bisri, 2026). Meskipun penelitian ini tidak secara khusus mengkaji sistem digital yang digunakan di SPPG Desa Wunut, pengelolaan operasional yang terstruktur menunjukkan adanya upaya untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program.

Ditinjau dari Teori Keynesian, implementasi Program MBG melalui SPPG merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja pemerintah yang dialokasikan melalui program ini tidak hanya menghasilkan manfaat berupa pelayanan gizi, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program sehingga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

B. Peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Mendorong Keterlibatan UMKM dan Penguatan Ekonomi Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Desa Wunut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan yang digunakan selama proses produksi makanan. Kebutuhan bahan baku yang dilakukan secara berkelanjutan menciptakan pasar yang relatif stabil bagi pelaku usaha lokal sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program MBG tidak hanya menghasilkan manfaat sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap produk lokal.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saepuloh dan Hilmi (2026) yang menjelaskan bahwa SPPG berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan Program MBG (Saepuloh & Hilmi, 2026). Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut (Ristanti et al., 2025).

Keikutsertaan UMKM dalam Program MBG tidak terlepas dari kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar kualitas, higienitas, legalitas, dan kapasitas produksi. Pendampingan kepada pelaku UMKM diperlukan agar mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah secara berkelanjutan. Putri et al. (2026) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas usaha, perbaikan fasilitas produksi, dan penguatan identitas usaha menjadi faktor penting dalam mendukung integrasi UMKM ke dalam Program Makan Bergizi Gratis (A. T. Putri et al., 2026).

Dari sisi pembangunan ekonomi, keterlibatan UMKM dalam Program MBG berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Meningkatnya permintaan terhadap produk lokal akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha serta memperluas perputaran ekonomi di tingkat desa. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Wicaksana, Windhani, dan Kirana (2025) yang menjelaskan bahwa efektivitas belanja publik dan pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila diarahkan pada kegiatan yang produktif dan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung (Wicaksana et al., 2025).

Dalam perspektif Teori Keynesian, kondisi tersebut menunjukkan adanya multiplier effect, yaitu ketika pengeluaran pemerintah melalui Program MBG menjadi pendapatan bagi UMKM, kemudian pendapatan tersebut kembali beredar melalui aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi sehingga memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu,

keberadaan SPPG di Desa Wunut tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

C. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Menciptakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG di Desa Wunut menunjukkan adanya upaya pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal melalui pengelolaan kegiatan yang terstruktur mulai dari proses pengadaan bahan pangan hingga pendistribusian makanan. Pengelolaan yang sistematis tersebut mendukung kelancaran operasional program sekaligus meminimalkan potensi pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep efisiensi sektor publik yang menekankan bahwa penggunaan sumber daya harus mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Devina Shava Amalia & Muhammad Taufik Hidayat, 2025). Efisiensi dalam sektor publik tidak hanya diukur berdasarkan besarnya penghematan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penggunaan sumber daya secara tepat sasaran (Devina Shava Amalia & Muhammad Taufik Hidayat, 2025).

Efektivitas penggunaan anggaran pemerintah sangat dipengaruhi oleh arah alokasi belanja yang dilakukan. Belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan belanja yang bersifat rutin karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Penelitian Sari dan Wasil (2026) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah perlu dioptimalkan pada sektor produktif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Sari & Wasil, 2026). Dalam konteks penelitian ini, implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG di Desa Wunut mencerminkan bentuk pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena anggaran yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan pemanfaatan bahan pangan lokal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga berkaitan dengan tingkat realisasi belanja yang sesuai dengan tujuan program. Pengelolaan anggaran yang terencana dan terealisasi secara optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Lubis et al. (2024) menjelaskan bahwa realisasi anggaran merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan belanja pemerintah karena menunjukkan tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan (Lubis et al., 2025).

Selain berorientasi pada efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran. Putri dan Yefriza (2025) menjelaskan bahwa belanja pemerintah daerah yang diarahkan pada pembangunan dan pelayanan publik mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putri & Yefriza, 2025). Temuan tersebut sejalan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Desa Wunut yang tidak hanya menghasilkan manfaat dalam bentuk pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok program sehingga manfaat anggaran pemerintah dapat dirasakan secara lebih luas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan pangan dari wilayah sekitar memberikan manfaat ganda bagi pelaksanaan Program MBG. Selain mampu memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya operasional, pendekatan tersebut juga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat karena anggaran pemerintah beredar di lingkungan sekitar SPPG. April et al. (2026) menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran memiliki hubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila belanja publik diarahkan pada kegiatan yang produktif (April et al., 2026).

Berdasarkan Teori Keynesian, pengeluaran pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipandang sebagai biaya penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi sebagai investasi fiskal yang mampu menciptakan aggregate demand. Ketika anggaran tersebut dibelanjakan kepada pelaku usaha lokal, maka akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui SPPG di Desa Wunut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran

tidak hanya tercermin dari penggunaan dana yang tepat sasaran, tetapi juga dari kemampuan program menghasilkan multiplier effect yang memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wunut menunjukkan bahwa pengelolaan program yang terstruktur dan pemanfaatan sumber daya lokal mampu mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus menciptakan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Keterlibatan UMKM dan pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Dalam perspektif Teori Keynesian, pengeluaran pemerintah melalui Program MBG dapat dipandang sebagai belanja produktif yang mampu menciptakan multiplier effect, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah terus memperkuat pemanfaatan produk dan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan Program MBG serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Langkah tersebut penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, memperluas manfaat ekonomi yang dihasilkan, serta menjaga keberlanjutan kontribusi program terhadap penguatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kepala desa, tokoh dan warga desa X di Kecamatan Y Kabupaten Sidoarjo atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

April, S., Bado, B., Retno, D., Regina, R., & Ma'ruf, M. I. (2026). Hubungan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. Jurnal E-Bis, 10(1), 127–148. https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i1.2914

Cahyo, W. A., & Bisri, M. (2026). Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi Pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall dan Black Box. Blend Sains Jurnal Teknik, 4(4), 859–871. https://doi.org/10.56211/blendsains.v4i4.1678

Devina Shava Amalia, & Muhammad Taufik Hidayat. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Pengelolaan Organisasi Sektor Publik. Journal of Social Humanities and Education, 1(1), 39–46. https://doi.org/10.65310/ty12h334

Lubis, P. K. D., Sinaga, E. N. M. B., Effendi, D., Daniel, H., & Sintia, I. (2025). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(1), 126–136. https://doi.org/10.56672/ykjs2y68

Putri, A. T., Nazihah, N., & Yuricki, E. (2026). Pendampingan UMKM Tahu Mojopuro dalam Upaya Integrasi ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 9(1), 69–78.

Putri, C., & Yefriza, Y. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Jesya, 8(1), 266–275. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1859

Ristanti, R., Anwar, C., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). Nusantara Community Empowerment Review Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian dan Ekonomi. 3(1), 77–82.

Saepuloh, S., & Hilmi, F. (2026). MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik. EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi, 4(1), 10–21. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v4i1.2466

Sari, A. D., & Wasil, M. (2026). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Asing, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. 9(1), 68–80. https://doi.org/10.33005/jdep.v9i1.732

Wicaksana, K. T., Windhani, K., & Kirana, A. R. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Dua Sisi Koin Pengentasan Kemiskinan : Peran Belanja Modal dan. 5(2).